

JURNAL

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TANA TORAJA DALAM
MENANGGULANGI PERJUDIAN BULANGAN LONDONG (SABUNG
AYAM) PADA UPACARA KEMATIAN DI TANA TORAJA**



Diajukan Oleh :

MENTARY PALAYUKAN

NPM : 100510336

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK2)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TANA TORAJA DALAM
MENANGGULANGI PERJUDIAN BULANGAN LONDONG (SABUNG
AYAM) PADA UPACARA KEMATIAN DI TANA TORAJA**



Diajukan Oleh
MENTARY PALAYUKAN
NPM : 100510336

Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK2)

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing,

Tanggal

: 27-04-2015
:

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,MS

Tanda tangan :

Mengesahkan
Pjs. Dekan
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(FX.Endro Susilo, S.H., L.L.M.)

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TANA TORAJA DALAM
MENANGGULANGI PERJUDIAN BULANGAN LONDONG (SABUNG
AYAM) PADA UPACARA KEMATIAN DI TANA TORAJA**

Mentary Palayukan, P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,MS

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The title of this essay is about The Role of Tana Toraja Local Government in overcoming *Bulangan Londong* (cockfight) Gambling on Funeral Ceremony in Tana Toraja. The legal issue is about the role of government, especially Tana Toraja local government in overcoming bulangan londong (cockfight) gambling on funeral ceremony in Tana Toraja. This essay using normative legal research focusing on positive norms relating to gambling. Bulangan londong gambling conducted not related to the funeral ceremony give negative impact for the society in Tana Toraja. Bulangan londong still there in Tana Toraja because Toraja traditional culture is still strong and also public mistakenly thought about gambling. Cockfighting in Toraja is a criminal offense because people also do gambling at the same time. Nowadays, the role of Tana Toraja local government is not yet effective because they have not made Local Regulation (PERDA) related to bulangan londong so the cockfighting gambling still often held until now.

Keyword: Cockfight, Gambling, Funeral Ceremony

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan pilihan yang benar akan menjadi pemenang. Praktek perjudian yang umum di Indonesia misalnya: togel, sabung ayam, judi pertandingan, judi kartu (poker, gaplek, remi, dan domino), judi aduan (menggunakan binatang.)

Saat ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah meluas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sebagian masyarakat memandang bahwa perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Di sisi lain, aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian.

Pada mulanya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian menjadi salah satu penyakit masyarakat yang dalam prosesnya ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perbuatan perjudian.¹

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam pasal 1 UU No. 7

¹ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, 1981, Jakarta, halaman 53

tahun 1974 tentang penerbitan perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam pasal 304 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan judi karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dalam menganalisis permainan. Di dalamnya termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya.”

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial.²

Perjudian sering terjadi di berbagai belahan di dunia, salah satunya yaitu di Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan, yang tercermin terhadap pola dan gaya hidup masing-masing. Perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan

² Ibid. Hlm. 57

perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut.

Kebudayaan-kebudayaan tersebut berkembang dalam masyarakat dan secara terus-menerus mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan social dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat meliputi, (1). perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat (2). Perubahan-perubahan yang pengaruhnya kecil dan yang besar pengaruhnya bagi masyarakat (3). Perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan. (4)

Kebudayaan ini juga berkembang sampai ke Toraja. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman di Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang dan berlangsung selama beberapa hari.

Dalam prosesi pemakaman, orang Toraja biasa juga mengadakan sabungan ayam. Sabungan ayam ini di masyarakat Toraja dikenal dengan istilah *bulangan londong* atau *massaung manuk*. *Bulangan londong* biasanya diadakan setelah upacara pemakaman selesai. Selain sebagai hiburan, sabung

³ Ahmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum* oleh Hakim

ayam atau *bulangan londong* dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak keluarga yang mengadakan acara pemakaman. Keluarga yang mengadakan sabung ayam memperoleh sejumlah uang dari penonton dan orang-orang yang datang untuk *massaung* (sabung ayam).

Bulangan londong (sabung ayam) dalam kaitannya dengan upacara kematian merupakan salah satu bagian kelengkapan terlebih pada upacara kematian tingkat rapasan. Upacara kematian di tana Toraja ada beberapa tingkatan dan pada tingkat rapasan tersebut sabung ayam harus diadakan namun tidak semua upacara kematian dengan tingkat rapasan boleh dilakukan sabung ayam.

Tradisi atau tradisi sabung ayam di Toraja berkembang dari generasi ke generasi hingga sampai saat ini, bahkan dibawa oleh orang Toraja di mana mereka merantau. Namun, sabung ayam pada saat sekarang ini tidak seperti lagi yang dahulu diadakan oleh nenek moyang masyarakat Toraja. Saat ini sabung ayam yang sering diadakan pasti dibarengi dengan judi. Dan sering juga ada penggrebekan jika diketahui oleh pihak kepolisian akan adanya sabung ayam.

Di Toraja, sabung ayam merupakan suatu hal yang sering sekali diperbincangkan oleh masyarakat. Para penjudi hampir menjadikan sabung ayam sebagai rutinitas untuk berkumpul sesama penjudi. Tidak jarang juga polisi membubarkan kegiatan sabung ayam jika mengetahui atau ada laporan yang masuk mengenai adanya kegiatan sabung ayam. Meskipun kadang polisi

¹ Frans Araruallo, 2011, Kebudayaan Toraja, Yogyakarta: Pohon Mahaya hal 17.

menangkap para penjudi sabung, namun mereka tidak kapok untuk tetap mengadakan sabung ayam.

Sekarang ini sabung ayam pada upacara kematian tidak lagi dipandang sebagai kelengkapan adat orang mati tetapi sudah dianggap sebagai dunia perbisnisan. Dikalangan masyarakat Toraja terdapat dua pendapat yang menyatakan sabung ayam adalah adat dan harus dilestarikan, di pihak lain sabung ayam dipandang sebagai bentuk perjudian dan sebagai penyakit masyarakat karenanya harus dibasmi.

Sampai saat sekarang ini acara bulangan londong pada upacara kematian (rambu solo) masih sering diadakan di semua wilayah Toraja dan dalam acara bulangan londong pasti ada juga orang-orang yang ikut dalam acara bulangan londong meskipun bukan dari kalangan bangsawan. Biasanya orang yang bukan dari kalangan bangsawan ikut dalam acara tersebut secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh aparat penegak hukum yang berjaga dalam acara bulangan londong tersebut. Sabung ayam selain dilarang oleh agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (UU/P). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 100 UU/P. 10 UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban judi 10. PP No. 1 tahun 1981.

“Judi” khususnya sabung ayam merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam memberantas perjudian masih sering mendapat kendala. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri dan negara semakin terpuruk. Selain itu perjudian sabung ayam masih susah untuk diberantas

karena pemerintah biasa memberi izin untuk mengadakan sabung ayam di Loraja.

Bulungan Londong di Loraja merupakan adat turun temurun yang dibawa oleh nenek moyang. Oleh karena itu, peran pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Loraja harus mencampuri hal-hal pokok dalam pelaksanaan upacara adat tersebut. Pemerintah Daerah Loraja dalam menanggulangi bulangan londong turut campur tangan mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan rambu solo’.

Cara bulangan londong muncul dari upacara rambu solo sudah menyimpang dari tujuan spritualnya serta sudah menjurus masuk ke dunia bisnis. Oleh karena itu, pihak pemerintah daerah Loraja harus meminimalisir serta melakukan penyuluhan tentang bulangan londong yang berkaitan dengan upacara adat serta penyuluhan tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari bulangan londong.

Menurut penelitian, aktivitas perjudian sulit diberantas karena adanya factor-faktor antara lain:

“Pertama, bagi etnik tertentu, perjudian merupakan suatu tradisi, sehingga meskipun dilarang mereka tetap akan melakukan judi baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kedua, keterbatasan dari aparat penegak hukum baik dari sisi jumlah personil maupun mental dan moralitasnya, sehingga pengawasan dan penertiban menjadi lemah. Bisnis judi beromzet besar justru dibekingi oleh aparat penegak hukum. Ketiga, sangat sulit untuk mendapatkan saksi, karena pada umumnya para

saksi-saksi merupakan orang-orang yang mempunyai ikatan bisnis perjudian tersebut. Keempat, selain dibentengi oleh orang penting juga tergabung dalam suatu jaringan dengan struktur organisasi yang tersusun rapi, sehingga yang berhasil dijangkit aparat hanya bandar-bandar kecil.”

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Toraja Dalam Menanggulangi Perjudian Gulungan Londong (sabung ayam) pada Upacara Kematian Di Toraja.”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peran pemerintah daerah Toraja dalam menanggulangi perjudian sabung ayam pada upacara kematian adat Toraja.

PEMBAHASAN

Dalam upacara Dipapitu dan upacara Kapasan yang didalamnya ada acara sabung ayam jarang sekali dilaksanakan sehingga dalam setahun belum tentu ada yang dapat diminta ijin keramaiannya dari yang berwajib atau Pemda Toraja. Permintaan ijin Gulungan londong dilaksanakan sejak datangnya pemerintah Belanda ke Toraja dan berlaku sampai pada saat ini demi terpeliharanya keterlibatan umum.

Sebelum datangnya pemerintah Belanda, maka ketentuan-ketentuan Gulungan Londong Sembangan Suke baru diatur pelaksanaannya oleh Para

¹ <http://suhadirembang.blogspot.com/2011/04/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html>

⁶ Frans Bararuallo, 2010, Kebudayaan Toraja, Yogyakarta: Pohon Cahaya. Hal.35

Imam bersama-sama Para Penguasa adat atau tokoh-tokoh adat setempat seperti Puang di Tallulembangna, Siambe' di Tallulipunna, dan Ma'dika di Tallusimbuang na.

Awal mulanya pemerintah belanda dan jepang memberi landasan hukum untuk penyelenggaraan bulangan londong dalam bentuk ijin penyelenggaraan (dikenal oleh masyarakat Toraja sebagai Paramisi). Dalam perkembangan selanjutnya, bulangan londong atau sabung ayam telah berfungsi secara lebih luas yang antara lain sebagai:⁷

- 1) Sarana hiburan,
- 2) Mata Pencaharian (khususnya oleh para Pandar),
- 3) Kesempatan melipatgandakan uang oleh para rentenir,
- 4) Sumber pendapatan tambahan bagi oknum-oknum aparat atau oknum-oknum masyarakat,
- 5) Pendorong politik bagi pihak-pihak tertentu, khususnya pada saat menjelang pemilihan pimpinan desa,

Kurang-berhasilan upaya-upaya penanggulangan eksese-eksese judi yang telah dilakukan sejak pemerintah orde lama, orde baru, dan sampai saat ini adalah bukti dari ketidaksiapan segenap warga masyarakat untuk mendukung upaya penanggulangan tersebut. Ketidaksiapan masyarakat inilah yang dalam hal banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengejar dan mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkannya, sehingga yang terjadi adalah semakin maraknya kegiatan

⁷ Mohammad Natsir Sitonda, 2005, Toraja Warisan Dunia, Makassar: Refleksi. Hal. 18

sabung ayam dan judi, baik secara sembunyi-sembunyi (*siboko*) maupun secara terang-terangan, yang secara hukum tergolong tindakan kejahatan yang melanggar hukum.⁸

Dalam bulangan londong pelaksanaannya berkaitan dengan rambu solo' atau rambu tuka' atau bahkan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidak saja memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Dalam arti bulangan londong sembang suke baratu dipahami masyarakat Toraja sebagai bagian dari upacara kematian yang berbeda dengan bulangan londong lainnya yang oleh orang awam adat disebut judi.

Pada hakekatnya bahwa bulangan londong merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari acara dukacita upacara rambu solo' pada tingkat rapasan karena bulangan londong tersebut harus dipertahankan, karena pelaksanaan bulangan londong merupakan bagian adat bagian dari integral dari prosesi pemakaman seseorang yang pelaksanaannya dilakukan oleh adat, maka peran pemerintah sangatlah sedikit.

Dalam artian keterlibatan pemerintah daerah dalam acara rambu solo' tingkat rapasan hanya pada urusan yang berorientasi pada pajak daerah, khususnya retribusi pajak pemotongan hewan. Pemerintah daerah tidak mencampuri hal pokok dalam pelaksanaan upacara rambu solo' tersebut.⁹

Berkaitan dengan bulangan londong pelaksanaannya diberbagai daerah sangatlah berbeda. Dalam arti, di daerah Toraja Utara pelaksanaan bulangan londong sangatlah banyak atau sering dilakukan dibanding dengan daerah laina

⁸ Frans Bararuallo, 2010, Kebudayaan Toraja, Yogyakarta: Pohon Cahaya. Hal. 38

⁹ Kepala Kantor Kecamatan Rantepao, Tana Toraja "Andarias Sesa" (wawancara 27 desember 2014)

Oraja. Pemerintah tidak tahu apa sebabnya terjadi hal demikian, namun di duga karena penyakit upacara rambu solo' pada tingkat rapasan. Oleh karena acara bulangan londong terkait langsung dengan adat rapasan dalam upacara rambu solo' maka pihak pemerintah daerah dituntut untuk campur tangan.¹⁰

Cara bulangan londong muncul dari upacara rapasan sudah menyimpang dari tujuannya dan telah ditimpangi dengan kepentingan bisnis. Oleh karena itu, pemerintah daerah mana Oraja tidak boleh melihat pelaksanaan upacara rambu solo' dari aspek pendapatan daerah seperti pajak potong hewan dan retribusi pariwisata tetapi harus mencampuri sejak dari awal pelaksanaan supaya tidak melenceng dari tujuan awalnya dan melakukan penyuluhan tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari sabung ayam.¹¹

Dampak negatif yang ditimbulkan dari sabung ayam yaitu bulangan londong sebagai permainan *to'den* (bangsawan) tetapi merambah keseluruhan lapisan masyarakat termasuk anak sekolah dan munculnya bulangan londong liar (*siboko*) yang dilakukan tidak berada dalam acara pemakaman. Dalam hal ini penulis melihat bahwa acara bulangan londong sangat sulit dibasmi tetapi setidaknya diminimalisir karena terkait langsung dengan longgarnya pelaksanaan rambu solo', dimana rambu solo' saat ini dinilai tidak pada tempatnya lagi dan lebih menitikberatkan pada penonjolan diri keluarga dibanding tujuan spiritualnya.

Oleh karena peran pemerintah dalam memperketat pelaksanaan acara tingkat rapasan melalui aparatnya seperti kepala desa harus didorong dan lebih

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

banyak mengambil peran dapat tidaknya almarhum diupacarakan pada upacara rambu solo' tingkat rapasan. Penulis berpendapat pelaksanaan upacara rambu solo' hendak pada konsep awalnya dimana yang bisa melakukan upacara rambu solo' tingkat rapasan hanya orang dari kalangan bangsawan yang berada pada tingkat Tana' Bulan, dengan memperhatikan bahwa apakah dalam acara tersebut betul-betul melaksanakan adat secara konsisten. Karena dulu sabung ayam wajib hukumnya pada upacara rambu solo' dan sekarang akibatnya ada yang negatif maka sabung ayam dapat ditinggalkan.

Pemerintah kabupaten Tana Toraja sampai pada suatu kesepakatan bahwa penanggulangan penyakit masyarakat yang diakibatkan oleh sabung ayam atau judi hanya dapat dilaksanakan melalui suatu proses yang perlu dirumuskan secara konseptual dan operasional. Proses dimaksud harus melibatkan semua komponen masyarakat Tana Toraja dan paling tidak mencakup tiga hal yaitu:¹²

- a) Penyadaran masyarakat secara terus menerus tentang ekses-ekses judi (oleh segenap lapisan masyarakat, khususnya oleh tokoh-tokoh agama).
- b) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan usaha yang produktif dan pengembangan kerja masyarakat (khususnya oleh petugas-petugas etnis).

¹² Ibid.

- c) Pemberdayaan aparat, pengembangan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum.

Sebagai tahapan awal dari proses ini maka perlu dipisahkan secara jelas antara:

- a) Bulangan londong yang merupakan unsure liturgi dalam upacara alukta.
- b) Bulangan londong atau tepatnya sabung ayam yang bernuansa judi atau sekedar sebagai sarana penyaluran hobby.

Dalam kaitan dengan acara bulangan londong yang merupakan unsur liturgi dalam upacara alukta, masih diperlukan adanya penyusunan dan sosialisasi dari aturan-aturan pelaksanaan acara tersebut. Diharapkan agar dalam waktu yang tidak lama dapat menerbitkan dan mensosialisasikan aturan-aturan pelaksanaan ini termasuk persyaratan-persyaratan dan prosedur perjanjian, melalui bantuan dan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Bana Bora.

Segenap bentuk judi merupakan perluasan dari sabung ayam yang menggunakan taruhan harus dihilangkan dari Bumi Wakipadada karena hal tersebut tergolong tindakan melanggar hukum. Berkaitan dengan itu dibutuhkan adanya komitmen yang diikuti dengan suatu implementasi secara terpadu dari segenap komponen masyarakat Bana Bora, seperti: SK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah.

husus untuk sabung ayam, dengan pertimbangan masih adanya kesulitan-kesulitan karena ketidaksiapan semua pihak yang telah disinggung diatas, maka disepahami bahwa aktifitas ini belum dapat dihilangkan dalam waktu singkat, sehingga alternatif penanggulangan ekseksekunya dapat dilakukan melalui pendekatan etika situasional dalam bentuk isolasi atau lokalisasi yang harus berada dalam suatu bingkai aturan yang ketat.¹³

¹³ Ibid.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah Muna Moraja dalam menanggulangi bulangan londong (sabung ayam) pada upacara kematian adat di Muna Moraja dapat dikemukakan kesimpulan bahwa dalam acara bulangan londong yang dilaksanakan bernuansa judi, pihak pemerintah atau aparat penegak hukum berwenang untuk membubarkan karena tidak memperoleh ijin, tetapi bulangan londong yang dilakukan dalam upacara kematian adat, pihak pemerintah atau aparat penegak hukum tidak berhak untuk membubarkan karena sudah termasuk dalam adat dan sudah memperoleh ijin.

Peranan Pemerintah Daerah Muna Moraja dalam menanggulangi bulangan londong yaitu mensosialisasikan aturan-aturan pelaksanaan termasuk persyaratan-persyaratan dan prosedur permainan. Aturan tersebut memuat pembatasan-pembatasan lokasi, pembatasan kriteria peserta/pemain, pembatasan waktu pelaksanaan dan aturan-aturan yang lebih teknis. Aturan-aturan tersebut hendaknya secara konsisten dan tegas dijalankan oleh pihak pemerintah dan aparat penegak hukum yang didukung oleh budaya hukum yang kondusif termasuk ketaatan warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Artono Artini, 1991, *Patologi Sosial*, Ajawali Pers, Jakarta.

Araruallo Rans, 2011, *Kebudayaan Toraja*, Pohon Mahaya, Yogyakarta.

Ali Ahmad, 2011, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*.

Sitonda Natsir Mohammad, 2004, *Toraja Warisan Dunia*, refleksi, Makassar.

Website :

<http://suhadirembang.blogspot.com/2011/04/perjudian-dalam-kajian-terdahulu.html>

<http://senibudaya-indonesia.blogspot.com/2011/04/sejarah-suku-toraja-adat-istiadat-suku.html>

<http://kuninghijau.wordpress.com/2011/04/01/upacara-kematian-rambu-solo-di-tana-toraja/>